**Pengaruh Lingkungan Luar terhadap Sistem Politik dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia**

|  |
| --- |
| Politik luar negeri seringkali dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional dan internasional. Dalam teori analisis sistem politik, politik luar negeri merupakan bagian dari output yang berasal dari lingkungan luar. Lingkungan luar memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan dalam sebuah sistem politikMenurut Easton, lingkungan luar yang berpengaruh kepada sistem politik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu sistem politik internasional dan sistem sosial internasional. Sistem politik internasional meliputi *individual political systems* seperti negara-negara kuat Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Jepang, Cina, dan juga kelompok sejumlah sistem seperti PBB, ASEAN, SEATO, OPEC, OKI, WTO, dan lainnya. Sedangkan sistem sosial internasional meliputi struktur sosial internasional seperti gerakan Hak Asasi Manusia, gerakan lingkungan, feminisme, lalu ada sistem demografi internasional terkait populasi dunia yang memengaruhi keamanan dunia, sistem ekonomi internasional yang terkait dengan mekanisme perdagangan internasional, korporasi multinasional, korporasi transnasional, dan terakhir adalah sistem budaya internasional seperti gelombang demokratisasi dan kemajuan teknologi.Dinamika politik internasional dimulai sejak berakhirnya perang dunia kedua. Ini ditandai dengan terbentuknya organisasi internasional seperti PBB, munculnya negara-negara baru, dan polarisasi kekuatan dua ideologi besar dunia yaitu liberalisme dan komunisme dalam kerangka perang dingin, era senjata nuklir dan lainnya. Dinamika ini memengaruhi bagaimana output dikeluarkan dalam sistem politik Indonesia. Ini dicontohkan misalnya dengan kebijakan politik Indonesia yang bebas aktif dan tidak dipengaruhi oleh salah satu blok. Berakhirnya Perang Dingin menandai perubahan baru perkembangan kapitalisme dunia. Pembangunan di negara berkembang khususnya Asia meningkat seiring dengan kritik-kritik yang terjadi. Krisis moneter Asia muncul tidak hanya karena faktor internal utang swasta dan kapitalisme berbasis korupsi, kolusi, dan nepotisme namun juga karena kepanikan investor akibat gejolak transaksi yang meningkat di pasar uang Asia. Ini menyebabkan pengaruh terhadap kondisi politik Indonesia seperti jatuhnya Soeharto dan transisi demokrasi yang menandai era reformasi di Indonesia. Pengaruh lainnya juga ditunjukkan dengan besarnya peran IMF yang memberikan pinjaman akibat krisis moneter ini yang kemudian berdampak pada intervensi IMF atas kebijakan politik dan restrukturisasi ekonomi. Isu terorisme juga memengaruhi kebijakan politik Indonesia. Pasca pengeboman World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 menyebabkan Amerika Serikat (AS) meningkatkan isu pertahanan dan keamanan dalam politik luar negerinya. Internasionalisasi isu terorisme menjadi persoalan bersama. Ini ditunjukkan ketika Indonesia mendapatkan bantuan dana besar untuk memberantas terorisme di Indonesia. Ini didasarkan bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari negara sumber terorisme bersama dengan Filipina, dan Malaysia di wilayah Asia Tenggara. Fokus Indonesia memberantas terorisme memberikan pengaruh pada peningkatan peran militer dan polisi sehingga fungsi sosial politik TNI/Polri menurun.  |